

BAB II

ICC SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN INTERNASIONAL DAN DINAMIKA KONFLIK RUSIA-UKRAINA

2.1 Latar Belakang Konflik Rusia-Ukraina

Konflik antara Rusia dan Ukraina bukanlah konflik yang baru saja terjadi. Akan tetapi, konflik antara kelompok separatis Rusia dan pasukan pemerintah Ukraina telah berlangsung selama 8 tahun sebelum terjadinya invasi Rusia tahun 2022. Pada tahun 2014, Ukraina menghadapi masalah internal terkait perekonomian negara yang dilatarbelakangi oleh penggulingan pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich. Pada masa itu Ukraina memiliki sejumlah hutang yang harus segera dibayarkan. UE dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam melihat situasi tersebut menawarkan pinjaman pada Ukraina dengan tujuan menjalin hubungan yang saling menguntungkan nantinya²⁹. Namun Rusia pada saat yang sama, juga menawarkan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar dari yang ditawarkan UE dan IMF. Pinjaman tersebut tidak diberikan Rusia tanpa adanya alasan, Rusia memberikan syarat kepada Ukraina agar tidak melakukan kerjasama dengan UE.

Victor Yanukovich pada masa itu menolak kerjasama perdagangan bebas dengan UE dan lebih memilih untuk melakukan kerjasama dengan Rusia karena kepemimpinannya lebih cenderung pro Rusia, sedangkan masyarakat Ukraina lebih

²⁹ Syahbuddin and Tati Haryati, *Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia*, Jurnal Pendidikan IPS, Vol, 12, No, 1 (2022), hal. 39–48 <<https://doi.org/10.37630/jpi.v12i1.617>>.

pro Barat³⁰. Adanya perbedaan tersebut kemudian menimbulkan aksi protes yang diikuti dengan aksi kekerasan oleh 300.000 demonstran Ukraina yang dikenal sebagai *Euromaidan Protest*³¹. Konflik tersebut kemudian mendorong terjadinya pembagian kekuasaan yang dimediasi oleh negara-negara Eropa dan diikuti dengan hilangnya Presiden Yanukovich dari Ukraina³². Pembagian kekuasaan tersebut kemudian mendorong terbentuknya pemerintahan baru Ukraina yang pro Barat.

Pasca terjadinya krisis Euromaidan dan munculnya pemerintahan Ukraina yang pro Barat menimbulkan kekhawatiran Rusia dalam memenuhi kepentingan negaranya. Kekhawatiran tersebut dilatarbelakangi oleh ketakutan akan kehilangan Ukraina yang selama ini berada dibawah pengaruhnya, oleh sebab itu Rusia berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya dengan menghindari beralihnya Ukraina pada Barat yang nantinya dapat mempengaruhi negara-negara lain untuk menjauh dari pengaruh Barat³³. Rusia memutuskan untuk melakukan intervensi militer dengan mengerahkan pasukannya ke Ukraina yang berakhir dengan menganeksasi wilayah Krimea pada tahun 2014³⁴. Hal tersebut didasari oleh

³⁰ Muhammad Fadly and Yusnarida Eka Nizmi, *Kebijakan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich Menolak Menandatangani EU-Ukraine Association Agreement Dengan Uni Eropa Tahun 2013*, Jurnal Jom FISIP, Vol, 2. No, 2 (2015), hal. 22.

³¹ Nigel Walker, *Conflict in Ukraine: A Timeline (2014 - Eve of 2022 Invasion)*, House of Commons Library, 2023, hal. 7.

³² Dimas Vandhita Putra, *Pengerahan Kekuatan Militer Rusia Ke Crimea Pada Tahun 2014*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya.

³³ Theunis Bates, *Ukraine's Fraught Relationship with Russia: A Brief History*, The Week, diakses dalam <<https://theweek.com/articles/449691/ukraines-fraught-relationship-russia-brief-history>> Pada 15 November 2023.

³⁴ Michael Birnbaum, *Putin Was Surprised at How Easily Russia Took Control of Crimea*, The Washington Post, 2015, diakses dalam <https://www.washingtonpost.com/world/europe/putin-was-surprised-at-how-easily-russia-took-control-of-crimea/2015/03/15/94b7c82e-c9c1-11e4-bea5-b893e7ac3fb3_story.html> Pada 16 November 2023.

permintaan Sergei Aksyonov yaitu pemimpin Krimea dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keteraturan dan keamanan Krimea serta untuk memberikan perlindungan bagi etnis Rusia yang berada di wilayah Krimea. Tindakan intervensi dan aneksasi tersebut dipengaruhi oleh doktrin militer Rusia yang cenderung lebih defensif dalam membela kepentingan nasional dan menjamin keamanan negara serta sekutunya dari ancaman³⁵. Doktrin militer ini berkaitan erat dengan tingkat politik strategis yang didefinisikan sebagai seperangkat pandangan negara mengenai perang, kekuatan, perencanaan angkatan bersenjata, dan metode pertahanan kedaulatan dan integritas wilayah³⁶.

Salah satu ancaman yang mengusik Rusia adalah perkembangan pasukan NATO yang mendekati sekutu dan wilayah perbatasan Rusia dengan perluasan infrastruktur militer NATO yang semakin mendekat³⁷. Hal ini diperkuat dengan kedekatan antara Ukraina dengan NATO yang mana kedua negara ini merupakan negara bekas pecahan Uni Soviet pada masa perang dingin yang merupakan musuh NATO. Dengan berdasarkan situasi tersebut, Rusia sadar bahwa perbatasannya akan terancam dengan kehadiran pasukan NATO di negara pecahan Uni Soviet, sebab letak markas militer Rusia berada di wilayah Krimea Ukraina yang saling berbatasan langsung dengan perbatasan Rusia dan banyaknya etnis Rusia yang tersebar di wilayah tersebut. Keberadaan markas angkatan laut yang terletak di

³⁵ *Russia's Military Doctrine*, Arms Control Association, diakses dalam <<https://www.armscontrol.org/act/2000-05/russias-military-doctrine>> pada 16 November 2023.

³⁶ Marcel De Haas, 2011, *Russia's Military Doctrine Development (2000-10)*, in *Russian Military Politics and Russia's 2010 Defense Doctrine*, ed. by Stephen J Blank, SSI, hal. 1–7.

³⁷ M. Saeri and others, *Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014-2022*, *Jurnal Dinamika Global*, Vol, 8, No, 2 (2023), hal. 319–334.
<<https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1887>>.

Black Sea Fleet Krimea merupakan salah satu warisan Uni Soviet pada masa Perang Dingin yang disetujui oleh Rusia dan Ukraina untuk dibagi sebagai lahan pertahanan angkatan laut kedua negara³⁸. Hal tersebutlah yang kemudian memicu sikap agresif Rusia untuk mengerahkan pasukan militernya di wilayah Ukraina.

Rusia melakukan pengajuan tuntutan terhadap Barat untuk meminta NATO agar segera mundur dan memberhentikan aktifitas militernya di Eropa Timur dan Ukraina. Dalam kondisi tersebut Rusia meminta untuk tidak menerima Ukraina maupun negara bekas pecahan Uni Soviet lainnya untuk bergabung sebagai bagian dari anggota NATO³⁹. Karena kedekatan diantara keduanya dapat mendorong kontrol negara Barat terhadap Ukraina yang nantinya akan turut mempengaruhi identitas Ukraina, sehingga Ukraina dipandang memiliki kemungkinan besar sebagai salah satu ancaman bagi Rusia dimasa depan. Hal ini tentu saja menjadi salah satu ancaman bagi wilayah eksternal keamanan Rusia berdasarkan doktrin militer Federasi Rusia. Oleh sebab itu, Rusia memutuskan untuk melakukan invasi terhadap Ukraina demi menjaga keamanan negaranya dan menguatkan posisi Rusia dalam menghadapi agresifitas ekspansi NATO yang telah berhasil menarik negara pecahan Uni Soviet, serta untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO⁴⁰.

³⁸ Mark Galeotti, *The Crimea: Russia's Ukrainian Peninsula*, IBRU Boundary and Security Bulletin, 1994, hal. 50-52.

³⁹ David A. Leon and others, *The Russian Invasion of Ukraine and Its Public Health Consequences*, The Lancet Regional Health - Europe, Vol, 15 (2022).
<<https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100358>>.

⁴⁰ Rizky Widiasa, *Bingkai Identitas Dalam Konflik Geopolitik: Intervensi Militer Rusia Di Ukraina*, Intermestic: Journal of International Studies, Vol, 3, No, 1 (2018), Hal. 60.
<<https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n1.5>>.

Pada tahun yang sama kelompok separatis Pro Rusia di wilayah Timur Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk berupaya mendeklarasikan kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DNR) dan Republik Rakyat Luhansk (LNR) dari wilayah Ukraina⁴¹. Akan tetapi deklarasi tersebut tidak berhasil dalam mendapatkan pengakuan internasional justru menyebabkan ketidakstabilan dan penderitaan bagi penduduk lokal dengan adanya bentrokan sporadis dengan kota Donbas. Dengan berdasarkan ketegangan tersebut pada tahun 2019, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjanjikan pengembalian wilayah-wilayah yang berada di Timur Ukraina, yaitu DNR, LNR, dan Krimea yang sebelumnya berusaha melepaskan diri. Akan tetapi, pada 21 Februari 2022, Rusia secara resmi mengambil langkah mengakui kemerdekaan DNR dan LNR untuk melindungi etnis negaranya yang berada di wilayah Ukraina⁴². Mengakui kemerdekaan DNR dan LNR juga menjadi salah satu strategi Rusia untuk melemahkan kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dengan tujuan menciptakan ketidakstabilan politik dan militer Ukraina yang nantinya dapat menghalangi keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan Barat.

Pada tanggal 24 Februari tahun 2022 Vladimir Putin selaku Presiden Rusia mengumumkan operasi militer khusus yang diikuti dengan aksi serangan ke Ukraina untuk melegitimasi intervensi militer Ukraina sebagai bentuk lanjutan strategi Rusia dalam memperkuat kontrol Rusia atas wilayah Ukraina yang tengah

⁴¹ Becky Sullivan, *Russia's at War with Ukraine. Here's How We Got Here*, NPR, diakses dalam <<https://www.npr.org/2022/02/12/1080205477/history-ukraine-russia>> pada 16 November 2023.

⁴² *Ukraina: Putin Mengumumkan Pengakuan Donetsk Dan Luhansk*, BBC, diakses dalam <<https://www.bbc.com/news/av/world-europe-60470900>> Pada 16 November 2023.

diperebutkan. Tindakan tersebut dilakukan Rusia dengan aksi memasuki wilayah Ukraina atas dasar penjagaan kedamaian dan aktifitas militer Rusia di Donbas. Akan tetapi, analisis pertahanan Barat mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa adanya aksi serangan yang disebabkan oleh peningkatan aksi pengepungan tentara Rusia di wilayah Ukraina⁴³.

Operasi militer khusus ini diawali dengan serangan pada wilayah Kyiv, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol yang dilakukan oleh Rusia dengan menumpuk militer berskala besar di wilayah Ukraina⁴⁴. Adapun pasukan militer yang dikerahkan oleh Rusia di sepanjang wilayah perbatasan Ukraina yaitu dengan total lebih dari 100.000 personil tentara Rusia⁴⁵. Rencana serangan yang dilakukan ini ditujukan untuk membentuk pemerintahan pro-Rusia yang dilakukan dengan upaya merebut wilayah ibu kota Ukraina yaitu Kyiv. Serangan tersebut dilakukan oleh Rusia dengan menggunakan pesawat tempur, rudal, dan tank untuk menghancurkan pangkalan militer dan lapangan udara Ukraina.

Dalam melancarkan rencananya tersebut, Rusia berupaya dengan melakukan serangan dan aksi pembunuhan pada tokoh-tokoh pemerintahan Ukraina. Pada bulan Maret 2023, Rusia melancarkan aksi penyerangan pada wilayah Kharkiv dan Mariupol, akan tetapi Rusia gagal mengepung wilayah

⁴³ Ruth Endam Mbah and Divine Wasum, *Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe*, *Advances in Social Sciences Research Journal*, Vol, 9, No, 3 (2022), hal. 144–53. <<https://doi.org/10.14738/assrj.93.12005>>.

⁴⁴ Zoya Sheftalovich, *Battles Flare across Ukraine after Putin Declares War*, Politico, diakses dalam <<https://www.politico.eu/article/putin-announces-special-military-operation-in-ukraine/>> Pada 21 Maret 2024.

⁴⁵ Claire Mills, *Ukraine: Russia's "Red Line"*, House of Commons Library, diakses dalam <<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9401/>> Pada 21 Maret 2024.

Kharkiv. Sedangkan pada wilayah Mariupol sekitar 90% wilayahnya telah berhasil dihancurkan oleh Rusia dan dinyatakan terdapat 20.000 orang tewas⁴⁶. Setelah melakukan aksi serangan tersebut kemudian Rusia berpindah fokus pada wilayah Selatan dan Timur Ukraina. Hal tersebut dilakukan Rusia dengan aksi pemboman pada daerah-daerah penduduk, penembakan, penyerangan infrastruktur, pembunuhan warga sipil dan anak-anak hingga tindakan deportasi anak-anak Ukraina secara ilegal⁴⁷. Berdasarkan serangan besar-besaran tersebut Rusia kemudian berhasil mencaplok wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Serangan tersebut berdampak besar pada banyaknya korban jiwa yang berjatuh dan menimbulkan kerusakan pada sekolah, tempat tinggal, hingga rumah sakit. Operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia ini dapat dikatakan sebagai aksi serangan yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan terbesar sejak 2014.

Aksi yang dilakukan oleh Rusia ini tidak hanya dilakukan dengan penyerangan saja, akan tetapi juga dilakukan dengan tindakan deportasi anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia yang dilakukan dengan secara ilegal. Aksi deportasi pada awalnya berkembang di wilayah negara Eropa. Yang mana aksi deportasi dipahami sebagai tindakan pengasingan dan pengusiran orang-orang yang melakukan tindakan kriminal ke wilayah lain sebagai bentuk penindakan negara terhadap para

⁴⁶ Vitaly Shevchenko, *Ukraine War: Life in Mariupol under Russian Occupation*, BBC , diakses dalam <<https://www.bbc.com/news/world-europe-64887890>> Pada 21 Maret 2024.

⁴⁷ Sudiq and Yustitianiingtyas, *Op. Cit.*

penjahat atas perbuatannya⁴⁸. Sementara itu, tindakan deportasi berdasarkan Hukum Internasional dipahami sebagai tindakan yang dipengaruhi oleh politik hukum dan politik luar negeri suatu negara⁴⁹. Oleh sebab itu, tindakan deportasi anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia merupakan salah satu hal kompleks yang tidak hanya didorong oleh alasan keamanan dan kesejahteraan saja, akan tetapi juga dilatarbelakangi oleh politik hukum dan politik luar negeri Rusia dengan tindakan pemisahan anak-anak Ukraina dengan orang tua dan keluarganya secara ilegal. Anak-anak yang dideportasi ke wilayah Rusia ini dijadikan sebagai sasaran Rusia dalam indoktrinasi pro-Rusia⁵⁰.

2.2 ICC dan Penanganan Kejahatan Internasional

ICC merupakan organisasi internasional yang berdiri sebagai lembaga peradilan internasional yang didirikan pada tahun 2002 di Den Haag, Belanda berdasarkan hasil konferensi internasional di Roma pada Juni 1998⁵¹. Kurangnya lembaga penegak hukum bagi masyarakat internasional sejak berakhirnya perang dingin menjadikan salah satu faktor pendorong didirikannya ICC sebagai badan penegakan

⁴⁸ Varda Oktavia Ramdani and others, *Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol, 3, No, 2 (2022), hal. 81.

⁴⁹ Tony Mirwanto and Asto Yudho Kartiko, *Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Adbimas Imigrasi, Vol, 1, No, 2 (2020), hal. 83.

⁵⁰ Delegasi PBB and OSCE, *Deportation of Ukrainian Children Amidst Russia's War of Aggression: How to Ensure Accountability and Children's Return*, EEAS, diakses dalam <https://www.eeas.europa.eu/delegations/vienna-international-organisations/deportation-ukrainian-children-amidst-russia's-war-aggression-how-ensure-accountability-and-children_en?s=66> pada 21 Maret 2024.

⁵¹ Tiara Triajiramadhani, *Peran International Criminal Court (ICC) Dalam Menghentikan Kejahatan Kemanusiaan Di Republik Demokratik Kongo Tahun 2012-2016*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

hukum internasional. Berdirinya ICC tersebut dilatarbelakangi oleh sejarah pembentukan mahkamah-mahkamah kejahatan internasional sebelumnya.

Mahkamah kejahatan internasional pertama didirikan pasca PD II yaitu dengan hadirnya pengadilan *International Military Tribunal* (IMT) atau dikenal sebagai *Nuremberg Tribunal* pada tahun 1945 dan *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE) pada 1946⁵². Hadirnya mahkamah tersebut berhasil dalam mengadili para pemimpin Nazi Jerman atas tindak kejahatan perang berdasarkan *London Agreement*. Akan tetapi, kedua mahkamah ini sama-sama tidak memiliki sifat imparial dan independensi⁵³. Oleh sebab itu, keputusannya sering kali dipengaruhi oleh konteks ideologi dan politik, dimana terdakwa yang diadili tidak berdasarkan hukum yang ada akan tetapi berdasarkan hukum yang dibuat setelah tindak kejahatan mereka dilakukan. Mahkamah internasional kedua dibentuk oleh DK PBB yang dikenal sebagai *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) pada tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) pada 1994⁵⁴. Dibentuknya mahkamah ini dengan tujuan untuk mengadili para pelaku kejahatan perang di tahun 1990 dengan memberikan dakwaan terhadap para pelaku tindak kejahatan genosida, kemanusiaan dan pelanggaran hukum humaniter internasional⁵⁵.

⁵² Robert Cryer and others, 2010, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* Cambridge: Cambridge University Press.

⁵³ Bhatara Ibnu Rezaa, 2002, *ICC: Suatu Tinjauan Politik dan Hukum*, Hukum Online, diakses dalam <<https://www.hukumonline.com/berita/a/icc-suatu-tinjauan-politik-dan-hukum-hol6775/>> pada 28 Juni 2024.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Op. Cit.*, 122-135.

Dengan berdasarkan kinerja mahkamah-mahkamah tersebut kemudian mendorong kesadaran masyarakat internasional untuk kembali membentuk gagasan dalam mengadili pelaku tindak kejahatan internasional. Gagasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan masyarakat internasional dalam mencegah tindakan kejahatan yang dapat mengancam keamanan, kedamaian serta kesejahteraan dunia⁵⁶. Keinginan untuk membentuk mahkamah peradilan baru ini didasarkan pada kebutuhan dunia internasional dalam menindak lanjuti kejahatan internasional melalui lembaga internasional yang dapat memberikan efisiensi dan efektifitas dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut kemudian mendorong pembentukan ICC sebagai lembaga peradilan internasional yang baru dan bersifat independen dengan berlandaskan pada Statuta Roma 1998. Diadopsinya Statuta Roma sebagai landasan hukum perjanjian pendirian ICC dilakukan pada 17 Juli 1998 oleh 120 negara⁵⁷. Statuta Roma sebagai landasan hukum ICC didalamnya mengatur terkait fungsi, tanggung jawab, kewenangan, dan yurisdiksi ICC sebagai mahkamah pidana internasional.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, adapun fungsi utama ICC yaitu untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan internasional yang telah dilakukannya dengan tujuan untuk melawan impunitas dengan memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat terbebas dari hukum.

⁵⁶ Bah Jatun Nadrati and others, *Yurisdiksi ICC Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia Ke Ukraina*, *Juris Notitia*, Vol, 1, No, 1 (2023), hal. 30–31.

⁵⁷ International Criminal Court, *Joining the International Criminal Court Why Does It Matter?*, diakses dalam <<https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Joining-Rome-Statute-Matters.pdf>>. Pada 5 Desember 2023.

Sedangkan tanggung jawab ICC mencakup perihal penuntutan dan penyelidikan individu yang diduga melakukan kejahatan internasional dengan upaya memastikan keadilan dan hak-hak para korban. Tanggung jawab tersebut dapat dilakukan ICC dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota dan komunitas internasional dalam menegakan hukum internasional. Sedangkan kewenangan ICC lebih menekankan pada kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional yang berada dalam yurisdiksi ICC. Kewenangan ini termasuk melakukan penyelidikan secara langsung, mengeluarkan surat perintah penangkapan, dan pemeriksaan kasus di pengadilan. Sementara itu, ICC memiliki yurisdiksi atas empat jenis kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi⁵⁸.

Adapun kejahatan internasional pada yurisdiksi ICC berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma 1998 yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan yaitu⁵⁹.

a. Genosida

Menurut Statuta Roma 1998 Pasal 6, genosida dipahami sebagai suatu tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan seluruh maupun sebagian bangsa, kelompok, etnis, agama atau ras dengan membunuh anggota kelompok atau dengan cara lain seperti, menyebabkan kerugian baik secara fisik maupun mental terhadap anggota kelompok, dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang dapat menyebabkan kemusnahan fisik dalam kelompok,

⁵⁸ Chloryne Dewi, *ICC and ASEAN: Weakening or Strengthening National Criminal Justice System*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol.06. No.02 (2019), hal: 407–423 <<https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a10>>.

⁵⁹ International Criminal Court, *Pasal 5: Crimes within the jurisdiction of the Court*.

melakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya kelahiran di dalam kelompok, serta memindahkan anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Dalam yurisdiksi ICC yang diatur pada Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan kemanusiaan mencakup segala tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan berskala besar yang ditujukan kepada penduduk sipil. Serangan yang ditujukan tersebut diketahui sebagai pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa atau deportasi penduduk, perampasan kebebasan, penyiksaan, penganiayaan kelompok tertentu, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, dan tindakan serupa yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan berat.

c. Kejahatan perang

Kejahatan perang merupakan pelanggaran berat dalam konteks konflik bersenjata yang telah melanggar Konvensi Jenewa 1949. Yurisdiksi ICC dalam kejahatan perang ini tercantum pada Statuta Roma Pasal 8 sehubungan dengan tindak kejahatan yang dilakukan dengan berdasarkan rencana atau kebijakan sebagai bagian dari komisi kejahatan berskala besar. Tindak kejahatan tersebut antara lain: tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, penyiksaan atau serangan terhadap warga sipil atau tawanan perang, penghancuran dan perampasan, penyanderaan, dan deportasi atau pemindahan dengan secara paksa dan tidak sah.

d. Kejahatan Agresi

Kejahatan agresi merupakan kejahatan yang direncanakan dan dipersiapkan dalam melaksanakan suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Tindakan tersebut ditujukan kepada kedaulatan, integritas dan kemerdekaan suatu negara. Pelaku dalam tindakan agresi ini umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki posisi atau kekuasaan untuk mengendalikan politik atau militer suatu negara. Kejahatan agresi ini mencakup pendudukan militer, invasi, aneksasi, dan blokade.

Berdasarkan yurisdiksi tersebut, ICC memiliki wewenang untuk menjalankan penyelidikan dan mengadili individu yang telah melakukan tindak kejahatan internasional dalam wilayah hukum ICC. Yang dimaksud dengan tindak kejahatan tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Statuta Roma yaitu kejahatan yang dilakukan seorang individu yang bertanggung jawab secara hukum atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam menjalan kendali atas tindakan kejahatan kepada suatu negara⁶⁰. Akan tetapi, dalam menjalankan wewenangnya ICC hanya dapat mengadili individu yang berusia di atas 18 tahun⁶¹. Apabila individu yang melakukan tindak kejahatan berusia di bawah 18 tahun, maka penanganan kasus tersebut tidak dapat dijalankan oleh yurisdiksi ICC. Sehingga individu akan dikembalikan pada negaranya dan akan diberikan hukuman sesuai dengan hukum nasional yang diterapkan oleh negara tersebut, hal ini diatur berdasarkan Pasal 26 Statuta Roma⁶².

⁶⁰ International Criminal Court, *Pasal 25: Individual criminal responsibility, ICC*.

⁶¹ International Criminal Court, *Pasal 26: Exclusion of Jurisdiction over Persons under Eighteen*.

⁶² Renata Christha Auli, *Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya*, Hukum Online, diakses dalam

Berlandaskan pada wewenang dalam melakukan penyelidikan terhadap individu yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan internasional hanya dapat dijalankan oleh ICC jika suatu kasus berada dalam yurisdiksinya. Dengan kata lain, ICC hanya dapat menuntut kejahatan yang dilakukan oleh warga negara dari Negara Anggota Pihak Statuta Roma atau di wilayah Negara Pihak Statuta Roma oleh warga negara yang bukan pihak Statuta Roma⁶³. Akan tetapi ICC dapat menjalankan tugas dan kewenangannya pada wilayah yang bukan bagian dari Negara Pihak Statuta Roma (*state parties*) dengan rujukan yang diberikan oleh DK PBB berdasarkan Pasal 13 (b) Statuta Roma atau dengan tunduknya negara non-pihak (*non state parties*) pada yurisdiksi ICC Pasal 12 ayat 3 Statuta Roma. Yang dimaksud dengan tunduknya *non state parties* pada yurisdiksi ICC yaitu ketika suatu negara yang bukan merupakan Pihak Statuta Roma menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC dan berkewajiban untuk bekerja sama dengan sepenuhnya bersama pengadilan terkait hal yang berkaitan dengan penyelidikan dan penuntutan tanpa adanya pengecualian dan penundaan dalam kerja sama tersebut.

Berlandaskan pada pelaksanaan yurisdiksinya berdasarkan Pasal 17 ayat 1 (a) Statuta Roma menyatakan bahwa yurisdiksi ICC hanya bersifat melengkapi pengadilan atau hukum nasional bukan menggantikan pengadilan nasional⁶⁴. Oleh sebab itu, ICC hanya melakukan intervensi jika pengadilan nasional sudah tidak mampu atau tidak mau untuk menyelidik dan mengadili suatu kasus kejahatan, maka ICC dapat melengkapinya. Sebaliknya, jika negara yang memiliki yurisdiksi

<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380>> pada 5 Desember 2023.

⁶³ ICC, *Op. Cit.*

⁶⁴ International Criminal Court, *Pasal 17 Ayat 1(a): Issues of Admissibility*.

masih berkeinginan untuk memproses dan mengadili kasus kejahatan yang dilakukan, maka ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus tersebut.

Partisipasi ICC dalam menindak lanjuti para individu yang melakukan tindak kejahatan internasional dilakukan untuk mengakhiri impunitas dengan meminta pertanggung jawaban pelaku kejahatan dengan upaya mencegah terjadinya kejahatan serupa yang dapat terulang kembali dan sebagai salah satu jalan keluar bagi negara yang tengah berkonflik⁶⁵. Untuk mencapai hal tersebut, maka ICC membutuhkan bantuan kerja sama negara-negara anggota dan komunitas internasional untuk dapat menangkap pelaku tindak kejahatan.

2.3 Terbitnya Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin

Pada 17 Maret 2023, Hakim Presiden ICC Piotr Hofmanski dalam video pernyataan yang disampaikan melalui platform Youtube ICC menyatakan bahwa Kamar PraPeradilan II ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menekankan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini benar adanya kejahatan perang dan deportasi anak-anak Ukraina yang dilakukan secara ilegal ke wilayah Rusia. Surat perintah tersebut diterbitkan berdasarkan nomor kasus ICC-01/22 dalam konteks situasi di Ukraina. Majelis ICC menilai terbitnya surat perintah penangkapan ini bersifat rahasia untuk melindungi korban dan saksi serta untuk mengamankan proses penyelidikan. Akan tetapi demi kepentingan keadilan, maka ICC berwenang untuk mengungkapkan kepada publik keberadaan surat perintah penangkapan, nama tersangka, dan kejahatan yang menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah. Dengan terbitnya surat

⁶⁵ Dhuara. *Op. Cit.*

ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik untuk berkontribusi dalam mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut⁶⁶.

Kejahatan yang dilakukan oleh Rusia menurut Statuta Roma 1998 termasuk dalam jenis kejahatan perang. Kejahatan perang sendiri dapat dipahami sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa tidak aman terhadap pihak lawan. Dalam Statuta Roma pasal 8 ayat 2, kejahatan perang dipahami sebagai tindakan kejahatan luar biasa yang termasuk pelanggaran berat atas hak asasi manusia yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949⁶⁷. Kejahatan perang yang dimaksud adalah kejahatan yang dilakukan dengan secara sadar seperti pembunuhan, penyiksaan, penderitaan fisik dan mental, perusakan dan perampasan, deportasi yang dilakukan secara ilegal, serta penyanderaan.

Operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia di wilayah Ukraina sejak 2022 menurut Sekretaris Jenderal PBB dianggap sebagai kejahatan perang yang telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan kehidupan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata⁶⁸. Yang mana, hukum humaniter internasional telah melarang keras atas tindakan deportasi atau pemindahan secara paksa terhadap orang-orang yang dilindungi. Hal tersebut

⁶⁶ International Criminal Court, 2023, *Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova*, diakses dalam <<https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and>> [diakses 11 Juli 2024].

⁶⁷ International Criminal Court, 2011, *Rome Statute of the International Criminal Court, International Criminal Court*.

⁶⁸ US Department of State, *The Kremlin's War Against Ukraine's Children*, U.S Department of State, 2023, diakses dalam <https://www.state.gov/the-kremlins-war-against-ukraines-children/> Pada 19 November 2023.

terlihat jelas pada salah satu komponen situasi konflik ini yaitu deportasi atau pemindahan anak-anak Ukraina secara paksa. Dalam situasi konflik ini terdapat ribuan anak Ukraina yang terkena dampak dari konflik antara kedua negara. Situasi tersebut berhasil memisahkan anak-anak Ukraina dari keluarga, negara, dan komunitasnya yang dilakukan dengan secara paksa oleh Rusia ke wilayahnya. Lvova Belova selaku Komisaris Hak Anak Federasi Rusia menyatakan bahwa terdapat 700.000 anak Ukraina yang telah berhasil dipindahkan ke Rusia⁶⁹.

Kejahatan internasional yang dilakukan oleh Rusia dibawah tanggung jawab Vladimir Putin berdasarkan Statuta Roma pasal 25 ayat 3 (a)(i) merupakan tindak kejahatan perang yang dilakukan dengan secara langsung, bersama-sama dengan orang lain maupun melalui orang lain; Pasal 25 ayat 3 (a) (ii) terkait kegagalan Vladimir Putin dalam menjalankan kendali atas bawahan sipil dan militernya. Sementara itu, deportasi anak Ukraina yang dilakukan Rusia dalam Statuta Roma Pasal 8 ayat 2 (a)(vii) dipahami sebagai tindakan deportasi yang dilakukan secara ilegal dan telah melanggar hukum; Pasal 8 ayat 2 (b)(viii) tentang pemindahan penduduk (anak-anak) yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia⁷⁰.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina yang dilakukan dibawah tanggung jawab Vladimir Putin jelas telah melanggar larangan Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998. Oleh karenanya, ICC selaku

⁶⁹ Current Time, *Russian Ombudsman Lvova-Belova: Since the Beginning of the War, More than 700 Thousand Ukrainian Children Have Been Taken to Russia*, Current Time, diakses dalam <<https://www.currenttime.tv/a/v-rossiyu-vyvezli-bolee-700-tysyach-ukrainskih-detey/32527102.html>> Pada 6 Desember 2023.

⁷⁰ International Criminal Court, *Op.Cit.*

instrumen penegak hukum pidana internasional memiliki wewenang untuk menegakan proses hukum terhadap Vladimir Putin selaku individu tindak kejahatan internasional. Kondisi tersebut tertuang pada Statuta Roma pasal 28 (b) terkait tanggung jawab atasan secara pidana atas tindakan yang dilakukan karena gagal dalam melaksanakan pengendalian yang baik terhadap bawahannya⁷¹.

Berdasarkan operasi militer khusus besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia, kemudian mendorong 43 negara anggota ICC yang merujuk situasi tersebut kepada ICC untuk segera ditindaklanjuti atas dugaan kejahatan perang dan deportasi anak-anak Ukraina secara ilegal⁷². Atas rujukan tersebut ICC melakukan proses investigasi situasi konflik yang terjadi di Ukraina oleh Kamar Pra-Peradilan II pada 2 Maret 2022. Investigasi ini dilakukan ICC dengan atas dasar diterimanya yurisdiksi ICC oleh Ukraina pada 9 April 2014 dan 8 September 2015 tanpa tanggal berakhir⁷³. Proses investigasi situasi ini dilakukan oleh tim penyelidik dan tim forensik ICC; kerjasama dengan pemangku kepentingan dan otoritas domestik lainnya; serta kerjasama dengan Tim investigasi gabungan (JIT) yang berada dibawah naungan Eurojust dalam memfasilitasi investigasi dan mencapai kesimpulan penyelidikan yang terlibat secara aktif di wilayah Ukraina⁷⁴. Dalam memudahkan proses investigasi ini, ICC juga melakukan pendirian kantor

⁷¹ Rome Statute, *Pasal 28 (b) Responsibility of commanders and other superior*, Rome Statute.

⁷² Office of the Prosecutor, *Further Notification on Receipt of Referrals and of Article 18 Letters*, International Criminal Court, diakses dalam <<https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/22-7>> Pada 4 Juni 2024.

⁷³ International Criminal court, *Op. Cit.*

⁷⁴ Office of the Prosecutor, *Statement by ICC Prosecutor; Karim A.A. Khan QC: Office of the Prosecutor Joins National Authorities in Joint Investigation Team on International Crimes Committed in Ukraine*, International Criminal Court, diakses dalam <<https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-office-prosecutor-joins-national-authorities-joint>> Pada 4 Juni 2024.

pengadilan ICC di wilayah Ukraina dengan berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani antara ICC dan Ukraina pada 23 Maret 2023 di Den Haag, Belanda⁷⁵.

Proses investigasi yang dilakukan secara obyektif dan independen oleh ICC terhadap situasi di Ukraina menghasilkan beberapa jenis bukti hukum kejahatan perang dan deportasi anak yang telah dilakukan oleh Rusia di Ukraina. Salah satu investigasi ICC yang membuktikan adanya kejahatan tersebut yaitu adanya keterangan yang berasal dari kesaksian korban dan saksi mata yang menyaksikan konflik diantara kedua negara ini. Keterangan tersebut terbukti dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Jaksa ICC Karim A.A Khan QC yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang terdampak serta menyaksikan kerusakan parah yang terjadi sejak invasi dilakukan. Dalam perjalanan investigasinya tersebut dilakukan dengan kunjungan pertama ke Kharkiv, Timur Ukraina untuk menyaksikan secara langsung dampak yang ditimbulkan serta mendengarkan kisah yang dialami oleh masyarakat yang terdampak⁷⁶.

Adapun bukti lain yang didapatkan oleh ICC dalam investigasi lokasi serangan di wilayah Ukraina yaitu adanya infrastruktur sipil dan rumah-rumah yang hancur akibat serang rudal yang dikirimkan. Selain bukti tersebut, perjalanan

⁷⁵ ICC, *Ukraine and International Criminal Court Sign an Agreement on the Establishment of a Country Office*, Internastional Criminal Court, diakses dalam <<https://www.icc-cpi.int/news/ukraine-and-international-criminal-court-sign-agreement-establishment-country-office>> Pada 4 Juni 2024.

⁷⁶ Office of the Prosecutor, *ICC Prosecutor Karim A. A. Khan QC Visits Kharkiv*, International Criminal Court, diakses dalam <<https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-karim-khan-qc-visits-kharkiv-ukraine-15-june-2022>> Pada 4 Juni 2024.

investigasi yang dilakukan ICC juga menemukan adanya aksi deportasi anak-anak Ukraina yang dibuktikan dengan kunjungan ke Ukraina Selatan tepatnya pada dua kilometer dari garis depan terdapat panti asuhan untuk anak-anak. Kondisi panti asuhan tersebut ditemukan dalam keadaan kosong akibat deportasi atau pemindahan secara tidak sah ke wilayah lain dengan meninggalkan gambar-gambar dan lemari yang masih penuh dengan pakaian⁷⁷. Hasil yang didapatkan terangkum dalam dokumenter, digital, forensik, dan testimonial yang digunakan ICC sebagai bagian dari penyelidikan⁷⁸. Bukti tersebut menyatakan bahwa benar adanya tindakan kejahatan perang dan deportasi anak-anak Ukraina yang dilakukan oleh Rusia.

⁷⁷ Office of the Prosecutor, *ICC Prosecutor Karim A. A. Khan KC Concludes Fourth Visit to Ukraine: "Amidst This Darkness, the Light of Justice Is Emerging"*, International Criminal Court, diakses dalam <<https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-karim-khan-kc-concludes-fourth-visit-ukraine-amidst-darkness-light-justice>> Pada 4 Juni 2024.

⁷⁸ Office of the Prosecutor, *Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on His Visits to Ukraine and Poland: "Engagement with All Actors Critical for Effective, Independent Investigations."*, International Criminal Court, diakses dalam <<https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-his-visits-ukraine-and-poland-engagement-all-actors>> Pada 4 Juni 2024.